

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

1. konsep Pemerintah

Pemerintah (dalam taliziduhu 2011; 6) adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Kemudian kemudian menurut Syafie (2011;5) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata pemerintahan itu sendiri paling sedikit 4 (empat) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- d. Antara kedua piha tersebut terdapat hubungan

Menurut Ndraha dalam Awang dan Wijaya (2012;8) pemerintah adalah badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun ikwal pemerintahan itu sendiri.

Pemerintahan (dalam buku taliziduhu 2011; 5) sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil.

Pada bagian lain, Bevir (2007: 385) menyebutkan bahwa “ the term government comes from the geek word “kuberna” means steering a ship. Memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani: Kubernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (government as an institution), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (government as a process). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah (didalam buku sadu wasistiono 2015;87)

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat suatu pemerintahan/ negara (didalam yusri munaf 2015;47).

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut syafie (2007;5) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintahan itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut

Pemerintahan secara arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut dengan eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termaksud juga lembaga yang

membuat peraturan perundang-undang (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). Menurut Syafie (2009;20)

Menurut Budiardjo (2008;21) memberikan pengertian pemerintah dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik adalah Negara, Kekuasaan, Pengambilan keputusan, kebijakan, pengambilan, atau alokasi.

Selanjutnya Ndraha (2003;6) mendefinisikan pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Ndraha juga menyebutkan istilah good governance dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama :

- a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintahan adalah pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai seluruh organ kekuasaan didalam negara yaitu Legislatif,

Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewenang untuk mencapai tujuan negara (2003:69)

rasyid (2002:14) mengemukakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintahan adalah sebagai berikut :

- A. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan dari dalam yang dapat mengulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integritas negara melalui cara-cara kekerasan.
- B. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- C. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga negara tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
- D. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga no-pemerintahan, atau yang akan lebih terlaksanakan.

E. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

F. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan kesejahteraan sosial.

G. Menerapkan kebijakan untuk pemeriharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3. konsep organisasi pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafii 2011;11) organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafii 2011;12) Organisasi adalah sebuah alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dari seluruh badan usaha.

4. Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selanjutnya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam peraturan hukum.

Kebijakan, Menurut Heinz dan Kenneth Prewitt (dalam Nashir, 1991;47) adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Kebijakan publik, menurut Dye (dalam Nurcholli, 2007;264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Menurut Rose (dalam Agustino, 2008;7) kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkompromi sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya Kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Agustino 2008;7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Menurut William N. Dull (2000; 109) mengemukakan bahwa kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termaksud keputusan-keputusan tidak bertindak) yang dibuat oleh

badan atau pejabat pemerintah, diformulasikan kedalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai ke pendidikan, kesejahteraan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Menurut Holwet dan M. Ramesh dalam (Subarsono, 2005;13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas 5 (lima) tahapan penting yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar sesuatu masalah mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai kinerja atau hasil kebijakan.

5. Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Artinya, kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya (edi suharto didalam jurnal).

Kebijakan sosial (social policy) menurut Jamrozik (didalam Isbandi Rukminto 2015;238) merupakan suatu mekanisme untuk mengalokasikan sumber daya masyarakat dapat mencapai hasil yang mereka inginkan, dimana di dalamnya ada keterkaitan antara objektif dan tujuan masyarakat, yang dicapai melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang dominan dimasyarakat tersebut, serta pada sisi berikutnya akan memperkuat nilai-nilai dominan pada masyarakat.

Kebijakan Sosial menurut Bruce S. Jansson dapat didefinisikan sebagai “suatu strategi kolektif yang menyelamatkan masalah-masalah sosial”. Definisi ini nampak serupa dengan apa yang dimaksudkan oleh Richard M. Titmuss (1974) bahwa kebijakan sosial merupakan prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial (didalam gajah mada university press 2008; 92)

Kebijakan sosial sejatinya merupakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy), yakni kebijakan pemerintah yang secara khusus melibatkan program-program pelayanan sosial bagi kelompok-kelompok kurang beruntung (disadvantaged groups), yakni para pemerlu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti keluarga miskin, anak telantar, pekerja anak, korban HIV/AIDS, penyalahguna Narkoba dan kelompok-kelompok rentan lainnya, baik secara ekonomi maupun psikososial (edi suharto dalam jurnal).

6. Masalah Sosial

Masalah Sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi dimana yang ada dengan situasi yang seharusnya.

Masalah tersebut bersifat sosial karena bersangkutan paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaannormatif dan dinamakan masalah sosial kareba bersangkutan dengan gejala gejala yang mengganggu kelangengan dalam masyarakat. Dengan demikian masalah masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang menyangkut segi moral. Dikatakan masalahkarena tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial timbul dari kekurangan yang dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologi, biokologis dan kebudayaan.

7. Anak Jalanan

Sebenarnya istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan tepatnya di Brazilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Namun, di beberapa tempat lainnya istilah anak jalanan berbeda-beda. Di Colombia mereka disebut "gamin" (urchin atau melarat) dan "ehinehes" (kutu kasur), "marginais"(kriminal atau marginal) di Rio, "pa'jaros frutero" (burung pemakan buah) di Pell4 "polillas" (ngrengat) diBolivia; "resistoleros"(perampok keeil) di Honduras, "Bui Doi"(anak dekil). Istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi Anak-anak jalanan ini dalam masyarakat (sumber : <http://febasfi.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-dan-karakteristik-anak.html>).

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan atau kadang juga disebut secara eufemistis sebagai anak mandiri menurut dari Rano Karno waktu beliau menjabat duta besar UNICEF, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terlihat anak jalanan, anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosialkurang atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertipan dan membuat ota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia(didalam muhammad suud 2006; 185).

Marginal, rentan, eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai, dan umumnya tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentang akan resiko yang ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial yang sangat rawan. Adapun disebut dengan eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (bargaining position) yang sangat lemah, tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung jawab (dalam muhammad suud 2006; 186).

Menurut Departemen Sosial RI (1999), pengertian tentang anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karenaberbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budayayang membuat mereka turun ke jalan.

Anak jalanan (didalam bagong suyanto 2003; 199) adalah anak anak yang tersisih, marginal, teraliensi dari perlakuan sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras dan bahkan tidak bersahabat.

Menurut farid, 1998 (didalam muhammad suud 2006:186) Sebagai bagian dari pekerja anak, anak jalanan sendiri sebenarnya bukanlah kelompok yang homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas pekerjaannya, berhubungan dengan orang tua atau orang dewasa terdekat, waktu jenis kegiatan dijalan serta jenis kelaminnya.

Menurut surbakti (didalam muhammad suud 2006:186), berdasarkan dari kajian dilapangan, Secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok:

- a. Pertama, children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang dengan orang tua mereka. Sedangkan penghasilan mereka dijalanandiberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- b. Kedua, children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentukan. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang kerena suatu sebab yaitu biasanya kekerasan, lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.
- c. Ketiga, children from families of the street, yakni anak-anak berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup

mereka terombang-ambing dari satu tempat yang lain dengan segala resiko

Keikutsertaan anak dalam mencari nafkah di usia belia dan turun kejalanan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi anak tersebut karena akan memberikan efek negatif pada masa depan karena diusia mereka yang seharusnya memperoleh perlindungan, pendidikan, kasih sayang dan lain sebagainya harus menerima kenyataan yang pahit dan harus turun kejalanan dan merasakan pahitnya mencari nafkah dijalanan dan menjadi anak jalanan sebenarnya bukanlah pilihan mereka tetapi karena faktor ekonomilah yang membuat mereka harus turun kejalanan.

7. Konsep Evaluasi

Didalam pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi masalah sosial anak jalanan di Kota Pekanbaru, untuk melihat pencapaian hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut, penulis mengambil beberapa definisi tentang teori evaluasi antara lain :

Menurut Ndraha (2003;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian menurut Suharsimi Arikunto (2004;1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, output, dan outcome (hasil), melalui evaluasi dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005;67).

Adapun menurut Sondang P. Siagian (2002;174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau samadengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

8. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nurcholis (2005;274) evaluasi kebijakan adalah penilaian secara keseluruhan input, proses, outputs, dan outcomes dari kebijakan pemerintahan.

Secara sederhana evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. ada beberapa model evaluasi dianatran das sosllen das sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.

Melalui evaluasi dapat dipotret realits pelaksanaan program dan generasi pola-pola hubungan antara berbagai dimens realitas yang diamatinya melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan kebijakan

dalam merancang program evaluasi kebijakan, william N. Dunn membuat beberapa kriteria sebagai pendoman dalam menentukan evaluasi

- a. Relevansi, relenvasi adalah evaluasi terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat
- b. Signifikansi, signifikansi adalah evaluasi terhadap informasi bahwa baru dan penting bagi pelaku untuk beranjak lebih dari selama ini mereka anggap jelas dan terang
- c. Validitas, vadilitas adalah evaluasi terhadap pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan dan program
- d. Reliabilitas, realibilitas adalah evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi pengukur yang tidak teliti dan tidak wajar.
- e. Objektivitas, Objektivitas adalah evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi pendukungh yang sempurna dan tidak melenceng yaitu informasi yang membuat evaluator evaluator dapat mencapai simpulan yang sama

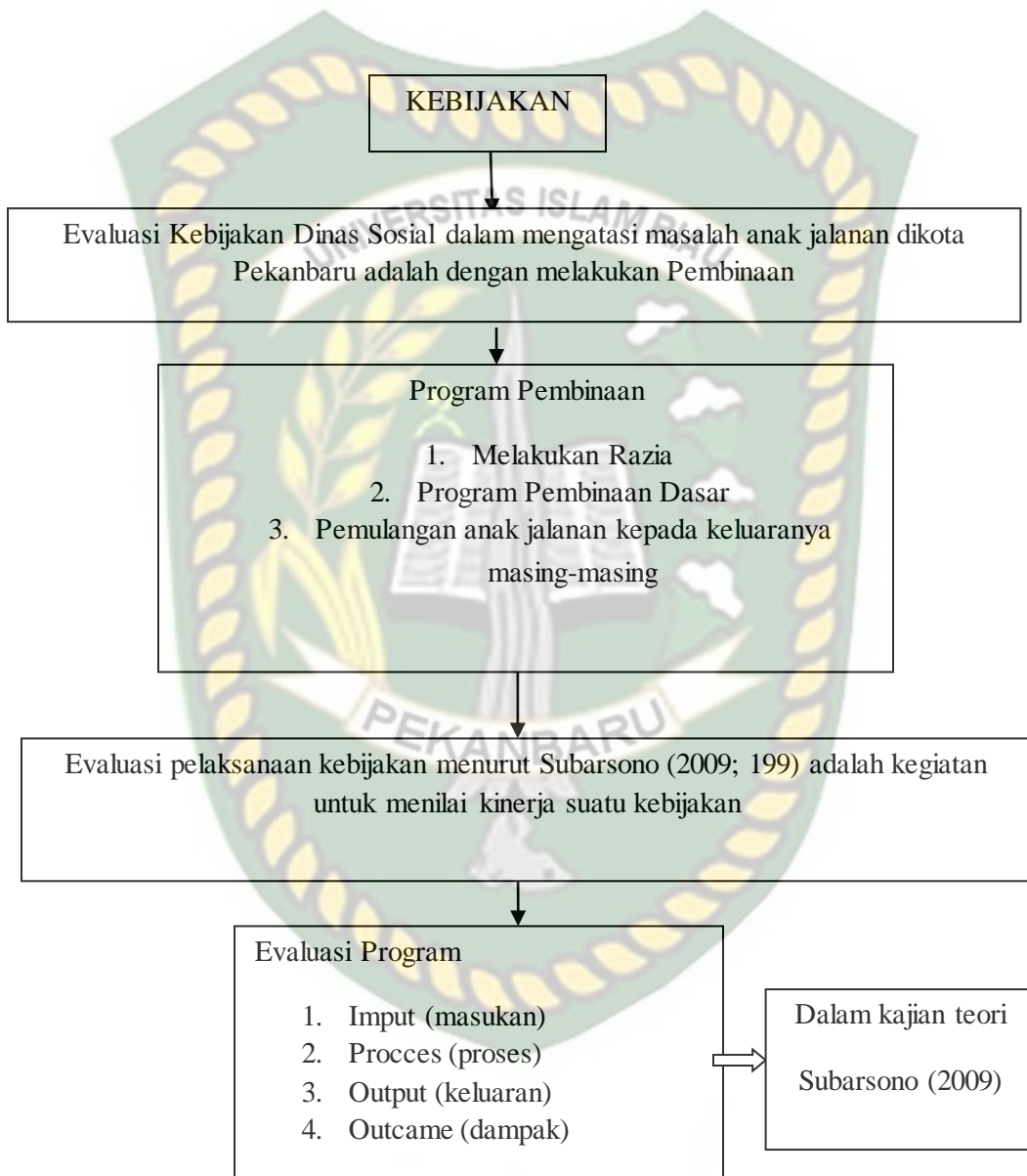
- f. Ketetapan waktu, adalah evaluasi yang membuat informasi tersedia pada waktu keputusan harus dibuat
- g. Daya guna, daya guna adalah evaluasi yang menyediakan informasi yang dapat dipergunakan dan dapat dimengerti oleh pengambilan kebijakan lainnya.

Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut dan diganti dengan kebijakan baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pejabat sebelumnya.

Setiap kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan efektif

2.2 Kerangka Pikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Masalah Sosial Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru.



Sumber : Modifikasi Penulisan Tahun 2017

2.3. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka penulis mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian tentang kebijakan dinas Sosial kota pekanbaru dalam mengatasi masalah anak jalana, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata dicapai dengan hasilyang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat diapai ketika sesuatu kebijakan itu dilaksanakan. Kebijakan pemerintah adalah segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau
2. lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.
3. Kebijakan Sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan
4. Kebijakan pemerintah adalah segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi

permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu untuk berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

5. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya diluar rumah untuk mencari nafkah dijalanan atau ditempat umum.
6. Pembinaan dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan. Memberikan pembinaan kepada anak jalanan, agar dapat mengatasi masalah sosial anak jalanan yaitu memberikan pembinaan kepada anak tersebut seperti dibalikan kepada daerahnya masing-masing (apabila tidak berasal dari pekanbaru) dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau diberikan pembinaan seperti keterampilan.

2.4. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel dari Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah Sosial Anak Jalanan di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Menurut Ndraha adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya	Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah sosial Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	a. persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan	a. pemberitahuan	Baik
			b. implementasi kebijakan yang dilaksanakan.	Cukup
			c. kegiatan yang dilaksanakan	Kurang
		b. Organisasi Masyarakat setempat	a. keterlibatan masyarakat	Baik
			b. transparansi Kegiatan	Cukup
			c. adanya OSM dalam membantu dalam mengatasi masalah anak jalanan.	Kurang
		c. Sistem Pembiayaan	a. alokasi dana	Baik
			b. anggaran dana operasional	Cukup
			c. kejelasan biaya dalam melaksanakan	Kurang

Sumber : Modifikasi Penulisan Tahun 2017

2.5 Teknik pengukuran

Untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka penulis perlu menetapkan ukuran baik untuk variabel maupun indikator variabel. Untuk ukuran variabel evaluasi kebijakan dinas sosial dalam menangani dan menanggulangi anak jalanan di Kota Pekanbaru dapat dikategorikan:

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada diposisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%-100%.

Cukup : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban 0%-33%.

Adapun untuk ukuran indikator, penulis tetapkan sebagai berikut :

1. Persiapan, perencanaan, dan pelaksanaandikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada diposisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 67%- 100%.

Cukup : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban 0%-33%.

2. Organisasi Masyarakat setempat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada diposisi baik,dan dengan persentanse skor jawaban responden 67%- 100%.

Cukup : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban 0%-33%.

3. Sistem pembiayaan dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada diposisi baik,dan dengan persentanse skor jawaban responden 67%- 100%.

Cukup : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban 0%-33%.

4. Indikator keberhasilan dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator variabel berada diposisi baik,dan dengan persentase skor jawaban responden 67%- 100%.

Cukup : Apabila dua hingga tiga indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban responden 34%-66%.

Kurang : Apabila hanya satu indikator variabel berada pada posisi baik, dan dengan persentase skor jawaban 0%-33%.

2.6 Penelitian Yang Terdahulu

Gambar 2.1 Penelitian Yang Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Indikator
1	Kurnia Putra Jasty	Kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman dalam pembinaan anak jalanan di Pekanbaru	Handoko (2001) menyatakan bahwa kinerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi dan menilai prestasi kerja karyawan dimana dalam kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan personalia umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja	Indikator kerja Organisasi menurut Kumotonomo : 1. efesiensi 2. efektif 3. keadilan 4. Daya Tanggap
2.	Chandra Rizal	Peran Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Telantar	Friedman adalah peran didasarkan pada preskripsi dan harapan peran yang menerangkan apa yang induvidu-individu harus lakukandalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan yang lainmenyangkut peran tersenut	1. Pemberdayaan Sosial 2. Pelayanan Sosial 3. Melakukan Sosialisasi
3.	Kasmanto Rinaldi dan Andriyus	Implementasi Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam melindungi Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru	Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi adalah tindakan yang dilakukan baik oleh induvidu-individu atau penjabat-penjabat atau Kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.	1. standar dan sasaran kebijakan 2. sumber daya 3. komunikasi antar badan pelaksana 4. karakteristik badan Pelaksana Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik 6. sikap pelaksana

Persamaan dari penelitian yang di teliti yaitu menyangkut tentang masalah sosial terutama anak-anak, dimana masa kecil anak-anak seharusnya mereka belajar, bermain denga teman serusia mereka, dan mendapatkan perlindungan dari negara. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Pekanbaru.